

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Teori Stewardship

Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah teori *stewardship*. Teori *stewardship* memiliki akar psikologi dan sosiologi yang di bentuk untuk menjelaskan situasi dimana manajer sebagai *steward* dan bertindak sesuai kepentingan pemilik (Davis & Donaldson, 1991) menggambarkan situasi para manajemen yang tidak termotivasi oleh tujuan-tujuan individu dan kepentingan pribadi tetapi lebih ditujukan pada tujuan utama mereka untuk kepentingan organisasi. *Teori stewardship* ini menggambarkan tentang adanya hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi (Murnawangsari 2009). Teori *stewardship* berdasarkan filosofis tentang sifat manusia bahwa manusia dapat dipercaya, bertanggung jawab, dan manusia merupakan individu yang berintegritas.

Teori *stewardship* dalam penelitian akuntansi sektor publik Instansi pemerintahan yang membutuhkan akuntansi sejak awal pembangunan. Sektor publik siap memenuhi kebutuhan informasi hubungan manajemen-pelanggan. Ini adalah kesepakatan antara pemerintah (manajer) dan orang-orang (pemimpin) berdasarkan kepercayaan hak kolektif dengan tujuan organisasi. Organisasi sektor publik bertujuan untuk melayani masyarakat dan meminta pertanggungjawaban mereka.

Relevansi *stewardship theory* dengan penelitian ini adalah keberadaan pemerintah daerah sebagai badan yang dapat dipercaya untuk bertindak demi kepentingan umum, melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, dan mewajibkan mereka dengan tanggung jawab anggaran untuk melakukannya. Dengan demikian, tujuan ekonomi, pelayanan publik, dan perlindungan sosial bagi masyarakat dapat dimaksimalkan. Badan-badan yang bertanggung jawab atas pemerintah telah menggunakan semua keterampilan dan keahlian mereka untuk merampingkan

pengendalian internal mereka sehingga laporan mereka dapat memberikan informasi keuangan berkualitas tinggi. Informasi keuangan dilihat melalui APBD berdasarkan kinerja keuangan pemerintah. Jika tujuan ini tercapai oleh pemerintah, maka masyarakat sebagai pemilik akan merasa puas dengan kinerja pemerintah (Rolianti 2022).

2.2 Kinerja Anggaran Berbasis *Value for Money*

Pengertian Kinerja Anggaran

Menurut PP No.21 tahun 2004 pasal 7 ayat 1 anggaran berbasis kinerja adalah penyusunan anggaran dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut. Pasal 7 ayat 2 menyebutkan bahwa dalam penganggaran berbasis kinerja diperlukan *indicator* kinerja, standar biaya, dan evaluasi kinerja dari setiap program dan jenis kegiatan (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, 2004).

Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 Pasal 1 ayat 35 menyatakan bahwa kinerja adalah hasil dari penggunaan anggaran dari kegiatan/program dan aktivitas yang telah dicapai yang diukur dengan jumlah dan kadar mutu. Secara teoritis, prinsip anggaran berbasis kinerja adalah suatu pertanggungjawaban anggaran sehingga setiap biaya yang dikeluarkan dapat dimanfaatkan sebaik mungkin dengan cara menggabungkan antara anggaran negara dengan hasil yang diinginkan (*output dan outcome*). Tujuan dirancangnya *performance based budgeting* untuk menciptakan proses pemanfaatan anggaran belanja publik yang efisien, efektif, ekonomis, dan tidak melupakan tujuan awal fokus pada prioritas utama yakni kepentingan masyarakat (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, 2005). Kinerja mengacu pada sesuatu yang berhubungan aktivitas melakukan pekerjaan yang dalam hal ini meliputi hasil yang diperoleh dari pekerjaan. Kinerja didefinisikan sebagai konstruksi tetapi multidimensi, ukurannya juga berubah tergantung pada kompleksitas faktor pembentuk kinerja (Mahmudi, 2005:6).

Dalam proses penganggaran dan evaluasinya, organisasi sektor publik, khusus nya pemerintah, selalu terfokus pada pada pengukuran input (*means measure*), bukan pengukuran *outcome (ends measure)*. Pengukuran demikian hanya terfokus pada penjelasan aktivitas-aktivitas organisasi, tetapi tidak menjelaskn dampak program-program pembangunan terhadap masyarakat (Nordiawan, 2014:157).

Menurut Departemen Keuangan Republik Indonesia/Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK 2008) menjelaskan elemen-elemen utama yang harus ditetapkan terlebih dahulu yaitu:

1. Visi dan misi yang dicapai

Visi mengacu pada apa yang ingin dicapai oleh pemerintah jangka panjang. Sedangkan tugasnya adalah kerangka deskriptif bagaimana visi itu diwujudkan.

2. Tujuan

Tujuan adalah blok bangunan dari visi dan misi. Tujuan tercermin dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional garis besar langkah-langkah yang perlu diambil untuk mencapai visi dan misi yang ditugaskan. Tujuan juga harus menggambarkan arah yang jelas tantangan realistis. Tujuan yang baik antara lain ditandai dengan fakta yang diberikan garis besar layanan utama yang akan disediakan, dijelaskan dengan jelas arah organisasi dan program-programnya, membutuhkan tetapi secara realistis, menentukan apa yang dilayani dan apa yang dicapai.

3. Sasaran

Tujuan menggambarkan langkah-langkah spesifik dan terukur untuk menyelesaikan tujuan. Sasaran akan membantu pemegang anggaran mencapainya tujuan dengan menetapkan tujuan yang spesifik dan terukur. Kriteria penargetan yang baik dilakukan menurut kriteria yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan memiliki kerangka waktu (spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, tepat waktu/cerdas) dan yang tidak kalah pentingnya adalah tujuan yang tepat mendukung tujuan.

4. Program

Program adalah serangkaian kegiatan yang akan dilakukan sebagai bagian dari upaya untuk mencapai seperangkat tujuan dan sasaran. Program bersama kegiatan dan harus disertai dengan tujuan *output* dan *outcome*. Program yang baik juga harus memiliki keterkaitan dengan tujuan dan sasaran masuk akal dan dapat dicapai.

5. Kegiatan

Kegiatan adalah rangkaian pelayanan dengan tujuan menghasilkan output dan hasil yang diperlukan untuk mencapai tujuan program. Bekerja Kriteria yang baik adalah harus dapat mendukung pelaksanaan program.

Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK, 2008) unsur-unsur anggaran berbasis kinerja yaitu :

1. Pengukuran kinerja

Pengukuran kinerja merupakan proses yang obyektif dan sistematis dalam mengumpulkan, menganalisis dan menggunakan informasi untuk menentukan efektivitas dan efisiensi layanan yang disediakan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Hasil Penganggaran berbasis kinerja menyelaraskan rencana strategis dalam program dengan penganggaran tertuang dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan.

a. Menentukan program dan kegiatan dengan jelas

Mencapai tujuan strategis berarti menentukan program dan kegiatan jernih. Biaya per program, kegiatan dan hasil juga harus didefinisikan dengan jelas. Struktur pendanaan yang jelas akan muncul apakah sistem akuntansi yang digunakan berbasis akuntansi akrual.

b. Sistem informasi yang memadai

Untuk mengukur kinerja yang baik diperlukan suatu sistem informasi dapat menghasilkan informasi yang cukup untuk membuat penilaian yang berhasil kinerja masing-masing instansi/unit kerja yang bertanggung jawab untuk suatu kegiatan

c. Pihak eksternal (independen)

Untuk mencapai penilaian yang adil, peran pihak eksternal sangat diperlukan mengukur kinerja secara lebih mandiri. Metode pengukuran kinerja akan bervariasi antar organisasi/unit kerja, tergantung pada jenis produksinya telah dibuat.

d. Mengukur kinerja yang strategis (*key performance indicators*)

Sistem pengukuran kinerja seharusnya hanya mengukur kinerja strategis, bukannya menekankan tingkat kinerja agregat yang komprehensif dan birokratis. (Komentar: kinerja tidak diukur dengan jumlah pesan masuk/keluar, jumlah laporan yang dibuat/jumlah pesan yang ditandatangani) karena jenis pengukuran ini dapat menyesatkan.

Manfaat Anggaran Berbasis Kinerja

(Mardiasmo, 2009) Mengemukakan pentingnya Anggaran berbasis kinerja bagi pemerintahan, karena beberapa alasan yaitu:

1. Anggaran merupakan alat bagi pemerintah untuk mengarahkan pembangunan sosial-ekonomi, memastikan keberlanjutan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
2. Anggaran diperlukan karena kebutuhan dan keinginan masyarakat tidak terbatas dan terus berkembang, sementara sumber daya yang ada terbatas. Anggaran diperlukan karena masalah sumber daya yang terbatas kekuasaan (kelangkaan sumber daya), pilihan (*choice*) dan kompromi.
3. Anggaran diperlukan untuk memastikan bahwa pemerintah akuntabel tanggung jawab kepada masyarakat. Dalam hal ini anggaran publik alat untuk melaksanakan akuntabilitas publik dari lembaga publik yang ada.

Value For Money

Value For Money adalah inti dari pengukuran kinerja dalam organisasi dalam sektor publik Kinerja tidak dapat bergantung pada output yang akan diproduksi tetapi harus mempertimbangkan masukan, keluaran dan hasil secara bersama-sama. Nilai untuk uang indikator kinerja fokus pada ekonomi, efisiensi,

dan efektivitas program dan kegiatan yang biasa disebut dengan 3Es. Ekonomis yaitu, hemat dan bijaksana dalam mengumpulkan sumber daya untuk hasil itu Maksimal dan efektif berarti keberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran (Mardiasmo, 2018:5).

Menurut (Mardiasmo, 2018:5) konsep *value for money* meliputi:

1. Ekonomi

Suatu perolehan input dengan kualitas dan kuantitas tertentu dengan harga tertentu terpendek. Ekonomi adalah perbandingan input dengan nilai input dinyatakan dalam satuan moneter. Ekonomi terkait dengan sejauh mana organisasi sektor publik dapat mengurangi sumber daya input yang digunakan, termasuk menghindari biaya yang boros dan tidak boros produktifitas.

2. Efisiensi

Mencapai output maksimal dengan input yang diberikan di atas gunakan input terendah untuk mendapatkan beberapa output. Efisiensi adalah rasio antara output dan input relatif terhadap standar kinerja atau menetapkan tujuan. Sederhananya, efeknya adalah membandingkan hasilnya dengan keluaran.

3. Efektivitas

Efektivitas adalah sejauh mana hasil program tercapai dengan tujuan telah didirikan. Efektivitas adalah perbandingan hasil dengan keluaran. Efektivitas dapat dipahami sebagai ukuran keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi mencapai tujuannya. Jika suatu organisasi berhasil mencapai tujuannya, maka organisasi dikatakan efektif. tujuan yang efektif harus spesifik, detail dan terukur. Untuk mencapai tujuan mereka, organisasi industri masyarakat seringkali tidak memperhatikan biaya yang dikeluarkan. Hal-hal seperti itu ini bisa terjadi jika laba bukan bagian dari indeks hasil.

Manfaat *Value For Money*

Menurut (Haryanto, Salmuddin, and Arifuddin, 2007) menyebutkan sebagai berikut :

1. Efektivitas pelayanan publik, dalam artian memberikan pelayanan yang tepat.

2. Meningkatkan mutu pelayanan publik.
3. Biaya pelayanan yang murah.
4. Alokasi belanja yang lebih berorientasi pada kepentingan publik.
5. Meningkatkan *Public Cost Awareness* sebagai akar pelaksanaan.

Indikator Kinerja Anggaran Berbasis *Value For Money*

Pada penelitian (Rolianti, 2022) beberapa indikator yang menjadi pengukuran kinerja anggaran berbasis value for money adalah sebagai berikut :

1. Alokasi biaya (ekonomi dan efisiensi)

Alokasi biaya (ekonomis dan efisien).

- Indikator ekonomi yang menggambarkan ekonomi meliputi dikelola dengan hati-hati atau cermat dan tanpa pemborosan. ada yang lain Operasi dapat dianggap ekonomis jika dapat dikurangi atau menghilangkan biaya yang tidak perlu. Dengan kata lain, ekonomi adalah pembelian barang dan jasa dengan kualitas tertentu dengan harga terbaik (menghabiskan lebih sedikit).
- Indikator efisiensi menggambarkan hubungan antara masukan sumber daya oleh suatu unit organisasi (misalnya staff, upah, biaya administrasi) dan keluaran yang dihasilkan. Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah mungkin.

2. Kualitas pelayanan (efektivitas)

- Indikator efektivitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak (*outcome*) dari keluaran (*output*) program dalam mencapai tujuan. Semakin besar kontribusi ouput yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi. Kegiatan operasional dapat dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (*Spending Wisely*).

2.3 Akuntabilitas

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 mengatakan bahwa

akuntabilitas yaitu bentuk pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Akuntabilitas sangat terkait dengan pertanggungjawaban terhadap efektivitas kegiatan dalam mencapai tujuan atau saran kebijakan atau program (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, 2010).

Akuntabilitas publik ialah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, 2018:27).

Akuntabilitas adalah kewajiban pemegang amanah/agent/kepala dan aparatnya untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk pertanggungjawaban tersebut (Setiana & Yuliani, 2017).

Jenis-jenis Akuntabilitas

Akuntabilitas publik terdiri atas dua macam menurut (Mardiasmo, 2018:27) yaitu: akuntabilitas vertikal (*vertical accountability*) dan akuntabilitas horizontal (*horizontal accountability*).

1. Akuntabilitas vertikal (*vertical accountability*) yaitu pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerinrah pusat, dan pemerintah pusat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
2. Akuntabilitas horizontal (*horizontal accountability*) yaitu pertanggungjawaban kepada masyarakat luas.

Menurut (Putri, 2017) akuntabilitas dapat dibedakan atas *democratic accountability, profesional accountability, and legal accountability* yakni:

- a. *Democratic Accountability* Akuntabilitas demokratis merupakan gabungan antara *administrative* dan *politic accountability*. Pemerintahan yang akuntabel atas kinerja dan semua kegiatannya kepada pemimpin politik. Pada negara - negara demokratis, menteri pada parlemen. Penyelenggaraan pelayanan publik akuntabel kepada menteri/pimpinan instansi masing-masing.
- b. *Profesional Accountability* dalam akuntabilitas profesional, pada umumnya para pakar, profesional dan teknokrat melaksanakan tugas-tugasnya berdasarkan norma-norma dan standar profesinya untuk menentukan *public interest* atau kepentingan masyarakat.
- c. *Legal Accountability* Berdasarkan katagori akuntabilitas legal (hukum), pelaksana ketentuan hukum disesuaikan dengan kepentingan public goods dan public service yang merupakan tuntutan (*demand*) masyarakat (*customer*). Dengan akuntabilitas hukum, setiap petugas pelayanan publik dapat diajukan ke pengadilan apabila mereka gagal dan bersalah dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana diharapkan masyarakat. Kesalahan dan kegagalan dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat akan terlihat pada laporan akuntabilitas legal.

Indikator Akuntabilitas

Pada penelitian (Rolianti, 2022) Beberapa indikator yang menjadi pengukuran akuntabilitas sebagai berikut :

1. Penghindaran penyalahgunaan jabatan.
2. Kepatuhan terhadap hukum.
3. Proses dan pertanggungjawaban anggaran
4. Pemberian pelayanan publik yang cepat, *responsive* dan murah biaya.
5. Pertimbangan tujuan dapat tercapai atau tidak dan hasil yang optimal biaya minimal.
6. Pertanggungjawaban pemerintah kepada DPRD dan masyarakat.

2.4 Transparansi

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah menyatakan bahwa Transparansi yaitu wujud dari pemberian informasi keuangan dan jujur kepada masyarakat luas berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengakses secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah berupa laporan tanpa ada yang dirahasiakan dari publik dalam setiap proses pengelolaan keuangan yang dapat dipercayakan kepada organisasi dan ketaatannya pada peraturan perundangundangan yang berlaku (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, 2010)

Transparansi adalah keterbukaan (*openness*) pemerintah untuk menyediakan informasi seluas-luasnya tentang kegiatan atas pengelolaan sumber daya publik untuk pihak yang memerlukan informasi tersebut. Pemberian informasi keuangan dan informasi lainnya yang berguna oleh pihak yang memerlukan untuk proses pengambilan keputusan merupakan kewajiban pemerintah (Mardiasmo, 2018).

Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan serta hasil yang dicapai (Mustari 2020).

Prinsip-prinsip Transparansi

Menurut (HFI n.d.) *Humanitarian Forum Indonesia* menyatakan ada 6 prinsip transparansi sebagai berikut :

1. Adanya informasi yang mudah dimengerti dan diakses.
2. Adanya publikasi dan media mengenai proses kegiatan dan detail keuangan.
3. Adanya laporan berkala mengenai pendayagunaan sumber daya dalam perkembangan proyek yang dapat diakses umum.
4. Laporan tahunan.

5. Website atau media publikasi organisasi.
6. Pedoman dalam penyebaran informasi.

Indikator Transparansi

Pada penelitian (Rolianti 2022) beberapa indikator yang menjadi pengukuran transparansi sebagai berikut :

1. Sistem keterbukaan kebijakan anggaran.
2. Dokumen anggaran mudah diakses.
3. Laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu.
4. Terakomodasinya suara rakyat.
5. Sistem pemberian informasi kepada publik.

2.5 Pengawasan

Keputusan Presiden No. 74 Tahun 2001 tentang tata cara pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah pasal 1 ayat (6) menyatakan bahwa pengawasan pemerintah daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Keputusan Presiden Republik Indonesia, 2001).

Pengawasan suatu proses kegiatan yang dilakukan secara terus menerus untuk mengamati, mempelajari dan meninjau setiap pelaksanaan kegiatan tertentu guna menghindari atau memperbaiki kesalahan atau penyimpangan yang terjadi. Kegiatan memastikan bahwa suatu kegiatan dilakukan arah dan menuju pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dengan melakukan penilaian, dan mengambil tindakan atas kegiatan yang menyimpang atau tidak tepat dibandingkan dengan tujuan yang telah ditetapkan (Kristanti, 2019).

Jenis-jenis pengawasan

Lingkup dan berdasarkan metode pengawasan sebagai berikut :

1. Pengawasan berdasarkan obyek

- a. Pengawasan terhadap penerimaan negara, yakni pengawasan terhadap seluruh bentuk penerimaan negara seperti penerimaan pajak dan bea cukai serta penerimaan bukan pajak.
 - b. Pengawasan terhadap pengeluaran negara, yakni pengawasan terhadap bentuk pengeluaran negara seperti belanja rutin dan belanja pembangunan.
2. Pengawasan berdasarkan sifat
- a. Pengawasan Preventif, yakni pengawasan yang dilakukan sebelum mulainya pelaksanaan suatu kegiatan atau sebelum terjadinya pengeluaran keuangan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan.
 - b. Pengawasan Detektif, yakni pengawasan yang dilakukan dengan meneliti dan mengevaluasi dokumen-dokumen laporan pertanggungjawaban untuk membandingkan antara hal yang telah terjadi dengan hal yang seharusnya terjadi.
3. Pengawasan berdasarkan ruang lingkup
- a. Pengawasan Internal, yakni pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan dari lingkungan internal organisasi yang bertujuan untuk melakukan tindakan verifikasi dan membantu pihak yang diawasi dalam melaksanakan tugasnya dengan baik.
 - b. Pengawasan Eksternal, yakni pengawasan yang dilakukan oleh unit pengawasan dari luar lingkungan organisasi.
4. Pengawasan berdasarkan metode pengawasan
- a. Pengawasan Melekat, yakni pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan langsung suatu unit organisasi terhadap pegawainya dengan tujuan untuk mengetahui dan menilai apakah program kerja yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - b. Pengawasan Fungsional, yakni pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional baik yang dari lingkungan internal maupun eksternal.

Indikator Pengawasan

Pada penelitian (Rolianti, 2022) beberapa indikator yang menjadi pengukuran pengawasan adalah sebagai berikut :

1. Masukan (Input)

Pengawasan. Input pengawasan ialah segala sesuatu yang diperlukan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan baik untuk menghasilkan keluaran. Input dalam kegiatan pengawasan terkait dengan sumber daya manusia, anggaran yang tersedia, sarana dan prasarana, serta waktu yang dipergunakan dalam melaksanakan aktivitas pengawasan.

2. Proses Pengawasan

Proses pengawasan ialah tahapan-tahapan yang dilalui selama menjalankan aktivitas pengawasan. Proses pengawasan berkaitan dengan tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap pelaporan.

3. Pengeluaran (*Output*)

Pengawasan. Output pengawasan ialah sesuatu yang diharapkan dapat dari suatu kegiatan pengawasan yang telah dilakukan. Output pengawasan terkait dengan laporan hasil pengawasan dan pengaruhnya terhadap obyek yang diperiksa atau pihakpihak terkait lainnya.

2.6 Partispasi Anggaran

Partispasi adalah sebuah proses pengambilan keputusan bersama antara dua pihak atau lebih dampak masa depan pada pengambil keputusan. Berpartispasi dalam penyusunan Penganggaran dipahami sebagai keterlibatan manajer operasi dalam pengambilan keputusan dengan Komite Anggaran tentang berbagai kegiatan yang akan datang masa depan akan diambil oleh manager untuk mencapai tujuan anggaran (Mulyadi, 2001:513).

Partispasi anggaran, sebagai suatu proses dalam suatu organisasi yang melibatkan para pemimpin dalam mengidentifikasi tujuan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya, termasuk tingkat partispasi dalam merumuskan orientasi, kebijakan, keputusan strategis, prioritas anggaran dan advokasi, serta masukan dalam proses

penyusunan anggaran secara rutin. Keterlibatan dalam penyusunan anggaran seharusnya lebih efisien, lebih efisien dan informasi hasil yang lebih akurat. Kemungkinan keterlibatan berbagai pihak dalam proses pengambilan keputusan dalam penyusunan anggaran (Mulyadi, 2001:515).

Partisipasi adalah keterlibatan langsung seseorang dalam tindakan mempengaruhi proses penganggaran, dan pekerjaan mereka dievaluasi untuk mencapai tujuan anggaran. Pengaruh dan kontribusi peserta terhadap proses penganggaran merupakan bentuk keterlibatan dengan komponen psikologis (Wijaya, 2018).

Indikator Partisipasi Anggaran

Pada penelitian (Rolianti, 2022) ada beberapa indikator yang menjadi pengukuran partisipasi anggaran adalah sebagai berikut :

1. Keterlibatan dalam penyusunan anggaran.
2. Pengaruh dalam penyusunan anggaran.
3. Komitmen dalam penyusunan anggaran.

2.7 Ketepatan Waktu

Ketepatan waktu mengacu pada interval waktu antara penyajian informasi yang diinginkan dan frekuensi komunikasi. Jika informasi ditransmisikan untuk waktu yang lama, itu akan kehilangan nilai informasi dengan mempengaruhi kualitas keputusan. Ketepatan waktu merupakan faktor penting dalam menyajikan informasi yang relevan. Karakteristik informasi yang relevan harus memiliki nilai prediktif dan disajikan tepat waktu (Baridwan, 2012:27).

Informasi yang tepat waktu dapat digunakan sebagai dasar untuk membantu pengambilan keputusan ekonomi dan menghindari keterlambatan dalam pengambilan keputusan (Gunawan Putra Dan M Rizal, 2012:12).

Menurut (Gregory and Van Horn, 1963) pada penelitian (Kristanti 2019) menyatakan bahwa, secara konseptual, ketepatan waktu berarti kualitas

ketersediaan informasi pada saat dibutuhkan atau kualitas informasi yang relevan dari waktu ke waktu. Peluang ada dalam dua cara, yaitu :

1. ketepatan waktu didefinisikan sebagai penundaan waktu pelaporan antara tanggal laporan keuangan dan tanggal pelaporan
2. ketepatan waktu didefinisikan sebagai ketepatan waktu pelaporan relatif terhadap tanggal pelaporan, tanggal pelaporan yang diharapkan. Dalam pengelolaan anggaran, anggaran dituntut pada ketepatan waktu saat pelaporan informasi diharapkan lebih awal, untuk menghindari keterlambatan atau keterlambatan dalam pengambilan keputusan pada saat penyusunan anggaran.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 menjelaskan bahwa ketepatan waktu laporan merupakan tersedianya informasi bagi pembuat keputusan pada saat dibutuhkan sebelum informasi tersebut kehilangan kekuatan untuk mempengaruhi keputusan. Informasi tidak dapat relevan jika tidak tepat waktu, hal itu harus tersedia bagi pengambil keputusan sebelum kehilangan kapasitasnya untuk mempengaruhi keputusan tersebut. Ketepatan waktu tidak menjamin relevansinya, tetapi relevansi tidaklah mungkin tanpa ketepatan waktu (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, 2010) pada penelitian (Satriani, 2022).

Indikator Ketepatan Waktu

Indikator yang digunakan dalam ketepatan waktu kinerja anggaran dalam konsep *value for money* diukur berdasarkan ketepatan penyediaan informasi kepatuhan anggaran di suatu instansi pemerintah, kemampuannya menyediakan informasi yang komprehensif dan akuntabel serta ketepatan waktu pelaksanaan. seperti yang didefinisikan. Pada penelitian (Lestari, 2018) indikator ketepatan waktu adalah:

1. Pelaporan laporan keuangan
2. Jadwal penyusunan
3. Penyajian laporan keuangan

2.8 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan salah satu referensi dasar saat melakukan suatu penelitian.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
1.	Novi Lestari (2018)	Pengaruh Akuntabilitas, Ketepatan Waktu Dan Transparansi Terhadap Kinerja Anggaran dalam Konsep <i>Value For Money</i> Pada Puskesmas Kota Palembang	Independen: Akuntabilitas, Ketepatan waktu, Dan Transparansi Dependen: Kinerja anggaran dalam konsep <i>value for money</i>	1. Secara parsial Akuntabilitas, Ketepatan Waktu dan Transparansi berpengaruh terhadap kinerja anggaran dalam konsep <i>Value For Money</i> 2. secara simultan Akuntabilitas, Ketepatan Waktu dan Transparansi berpengaruh terhadap kinerja anggaran dalam konsep <i>Value For Money</i>
2.	Renny Kristanti (2019)	Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Pengawasan, Komitmen Organisasi,	Independen: Akuntabilitas, Transparansi, Pengawasan, Komitmen	1. Akuntabilitas, Transparansi, dan Komitmen Organisasi tidak berpengaruh

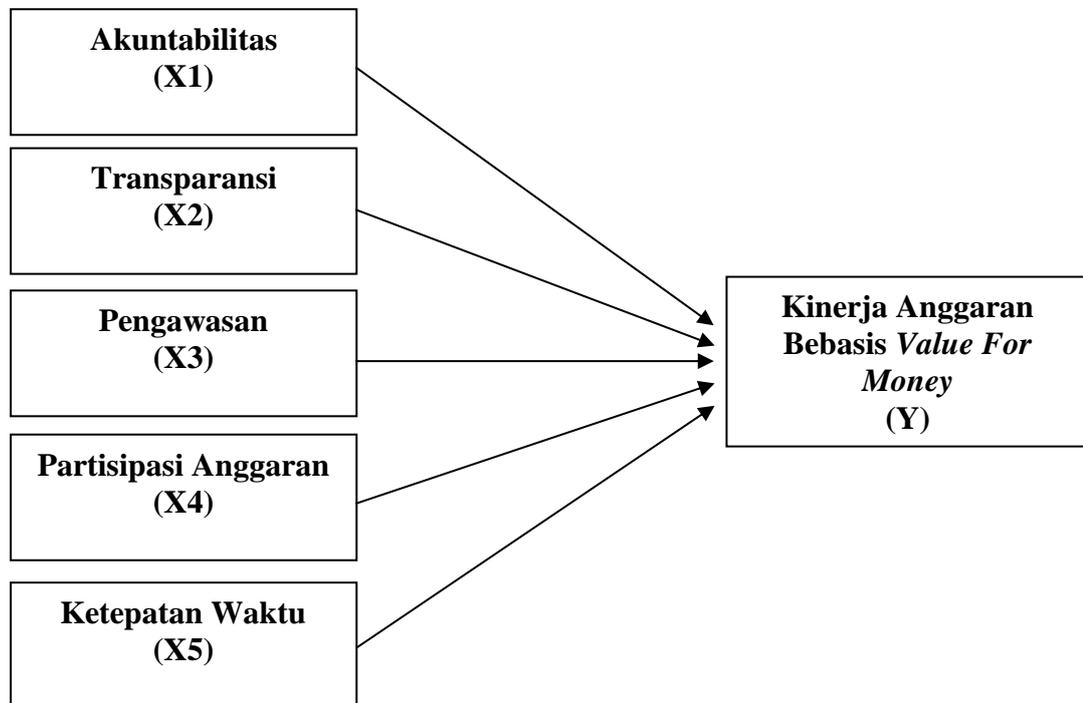
		Dan Ketepatan Waktu Terhadap Kinerja Anggaran Berkonsep Value For Money (Studi Empiris Pada Opd Kota Magelang)	organisasi, Ketepatan waktu. Dependen: Kinerja Anggaran Berkonsep Value For Money	terhadap kinerja anggaran berkonsep <i>value for money</i> Pada OPD kota Magelang 2. Pengawasan dan Ketepatan waktu berpengaruh terhadap Kinerja Anggaran berkonsep <i>value for money</i> Pada OPD kota Magelang
3.	Fera Tri Wulandari Hermanto (2020)	Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Pengawasan Terhadap Kinerja Anggaran Dengan Konsep <i>Value For Money</i> pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BAPPENDA) Kabupaten Tegal	Independen: Akuntabilitas, Transparansi, Pengawasan Dependen: Kinerja Anggaran dengan konsep <i>Value For Money</i>	1. Akuntabilitas, Transparansi, Pengawasan berpengaruh terhadap kinerja anggaran dengan konsep <i>value for money</i> pada badan pengelolaan pendapatan daerah (BAPPENDA) kabupaten Tegal 2. Akuntabilitas, Transparansi, Pengawasan secara simultan

				berpengaruh terhadap kinerja anggaran dengan konsep <i>value for money</i> pada badan pengelolaan pendapatan daerah (BAPENDA) kabupaten Tegal
4.	Mustari (2020)	Pengaruh Nilai-Nilai Transparansi, Akuntabilitas Dan Konsep Value For Money Terhadap Pengelolaan Keuangan Di Bidang Sektor Publik Pada Bappelitbangda Sul-Sel	Independen: Nilai-Nilai Transparansi, Akuntabilitas, Konsep Value For Money. Dependen: Keuangan Di Bidang Sektor Publik	1.Nilai-nilai Transparansi, Akuntabilitas dan Konsep <i>Value For Money</i> berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan dibidang sektor publik Pada Bappelitbangda
5.	Anis Iffa Satriani (2022)	Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Pengawasan, Ketepatan Waktu, Dan Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja Anggaran Berkonsep <i>Value For</i>	Independen: Akuntabilitas, Transparansi, Pengawasan, Ketepatan Waktu, Partisipasi Anggaran	1.Akuntabilitas, pengawasan dan Partisipasi Anggaran berpengaruh terhadap Kinerja Anggaran Berkonsep <i>Value For Money</i> pada

		<i>Money</i> Pada Opd (Organisasi Perangkat Daerah) Kota Semarang	Dependen: Kinerja Anggaran Berkonsep Value For Money	OPD Kota Semarang. 2. Transparansi dan Ketepatan waktu tidak berpengaruh terhadap Kinerja Anggaran Berkonsep <i>Value For Money</i> pada OPD Kota Semarang.
6.	Settya Rolianti (2022)	Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Pengawasan Dan Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja Anggaran Berbasis Value For Money Di Opd Kabupaten Pesawaran	Independen: Akuntabilitas, Transparansi, Pengawasan Partisipasi Anggaran. Dependen: Kinerja Anggaran Berbasis Value For Money	1. Pengawasan dan Partisipasi Anggaran Berpengaruh Terhadap Kinerja Anggaran Berbasis <i>Value For Money</i> di OPD Kabupaten Pesawaran. 2. Akuntabilitas dan Transparansi tidak Berpengaruh Terhadap Kinerja Anggaran Berbasis <i>Value For Money</i> di OPD Kabupaten Pesawaran.
7.	Suci Rahayu	Pengaruh Nilai Transparansi,	Independen: Transparansi,	1. Nilai Transparansi Akuntabilitas

	(2022)	Akuntabilitas Dan Konsep Value For Money Terhadap Pengelolaan Keuangan Di Bidang Sektor Publik Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Sumatera Utara	Akuntabilitas, Konsep Value For money Dependen: Pengelolaan Keuangan di sektor publik	Konsep <i>Value For Money</i> berpengaruh terhadap Pengelolaan Keuangan Di Bidang Sektor Publik pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Sumatera Utara. 2. Nilai Transparansi, Akuntabilitas, dan Konsep <i>Value For Money</i> berpengaruh secara simultan terhadap Pengelolaan Keuangan Di Bidang Sektor Publik
--	--------	--	--	---

2.9 Kerangka Pikir



Gambar 2.1
Kerangka Pikir

2.10 Bangunan Hipotesis

1. Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Kinerja Anggaran Berbasis *Value For Money*

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 mengatakan bahwa akuntabilitas yaitu bentuk pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Akuntabilitas sangat terkait dengan pertanggungjawaban terhadap efektivitas kegiatan dalam mencapai tujuan atau saran kebijakan atau program (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, 2010).

Akuntabilitas adalah kewajiban pemegang amanah/agent/kepala desa dan aparatnya untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan

mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk pertanggungjawaban tersebut (Yuliani & Setiana, 2017).

Akuntabilitas ialah kewajiban agen untuk mengelola sumber daya, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada *principal*. Akuntabilitas merupakan salah satu indikator penilaian kinerja instansi pemerintah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semakin kuat penerapan akuntabilitas, maka semakin tinggi pula kinerja anggarannya. Hal ini dikarenakan untuk menghasilkan kinerja anggaran yang baik butuh pertanggungjawaban anggaran agar dapat menghasilkan laporan keuangan yang diharapkan (Mahmudi, 2010:23).

Penelitian yang dilakukan oleh (Rolianti, 2022) menyatakan bahwa Akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja anggaran berbasis *Value For Money*. Maka dapat ditarik kesimpulan untuk hipotesisnya sebagai berikut :

H1 : Akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja anggaran berbasis *Value For Money*

2. Pengaruh Transparansi Terhadap Kinerja Anggaran Berbasis *Value For Money*

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah menyatakan bahwa Transparansi yaitu wujud dari pemberian informasi keuangan dan jujur kepada masyarakat luas berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengakses secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah berupa laporan tanpa ada yang dirahasiakan dari publik dalam setiap proses pengelolaan keuangan yang dapat dipercayakan kepada organisasi dan ketaatannya pada peraturan perundangundangan yang berlaku (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, 2010).

Transparansi adalah keterbukaan pemerintah untuk menyediakan informasi seluas-luasnya tentang kegiatan atas pengelolaan sumber daya publik untuk pihak yang memerlukan informasi tersebut. Pemberian informasi keuangan dan informasi lainnya yang berguna oleh pihak yang memerlukan untuk proses pengambilan keputusan merupakan kewajiban pemerintah (Mardiasmo, 2018).

Transparansi menjadi salah satu faktor kunci dalam pelaksanaannya pemerintahan yang bagus contoh pemerintahan yang baik membutuhkan keterbukaan, partisipasi dan kemudahan penggunaan dari masyarakat dari proses penyelenggaraan negara. Keterbukaan dan kenyamanan informasi yang diterima dari kantor negara terpengaruh membuat indikator lainnya. Transparansi berarti memberikan informasi yang terbuka informasi tentang ekonomi atau kebijakan pemerintah dan memastikan akses ke semua orang atau masyarakat tentang informasi (Umami & Nurodin, 2017).

Penelitian yang dilakukan oleh (Hermanto, 2020) menyatakan bahwa Transparansi berpengaruh terhadap kinerja anggaran berbasis *Value For Money*. Maka dapat di tarik kesimpulan untuk hipotesisnya sebagai berikut :

H2 : Akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja anggaran berbasis *Value For Money*

3. Pengaruh Pengawasan Terhadap Kinerja Anggaran Berbasis *Value For Money*

Keputusan Presiden No. 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Pasal 1 ayat (6) menyatakan bahwa pengawasan pemerintah daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Keputusan presiden, 2001).

Pengawasan merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan secara terus menerus atau berkesinambungan untuk mengamati, memahami, dan meneliti

setiap pelaksanaan kegiatan tertentu sehingga dapat dicegah atau diperbaiki kesalahan atau penyimpangan yang terjadi. proses pemantauan kegiatan untuk menjaga bahwa suatu kegiatan dilaksanakan terarah dan menuju kepada tercapainya tujuan yang telah direncanakan dengan mengadakan penilaian, tindakan kooperatif terhadap kegiatan-kegiatan yang menyimpang atau kurang tepat dengan sasaran yang dituju (Kristanti 2019).

Tujuan pengawasan yaitu untuk mengamati apa yang sesungguhnya terjadi serta membandingkannya dengan apa yang seharusnya terjadi. Apabila ternyata kemudian ditemukan adanya indikasi- indikasi penyimpangan atau hambatan, maka penyimpangan atau hambatan itu diharapkan dapat segera dideteksi dan dikenali agar dapat segera diambil tindakan koreksi dan diperbaiki. Melalui tindakan koreksi ini, maka pelaksanaan kegiatan yang bersangkutan diharapkan masih dapat tercapai secara maksimal. Selain itu adanya deteksi penyimpangan dapat digunakan sebagai peringatan bagi suatu organisasi, bahwa mereka harus hati- hati dan harus meningkatkan kewaspadaan (Satriani 2022).

Penelitian yang dilakukan oleh (Hermanto, 2020), (Rolianti, 2022) dan (Satriani, 2022) menyatakan bahwa pengawasan berpengaruh terhadap kinerja anggaran berbasis *Value For Money*. Maka dapat di tarik kesimpulan untuk hipotesisnya sebagai berikut :

H3 : Pengawasan berpengaruh Terhadap kinerja anggaran berbasis *Value For Money*.

4. Pengaruh Pengawasan Terhadap Kinerja Anggaran Berbasis *Value For Money*

Partisipasi anggaran, sebagai suatu proses dalam suatu organisasi yang melibatkan para pemimpin dalam mengidentifikasi tujuan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya, termasuk tingkat partisipasi dalam merumuskan orientasi, kebijakan,

keputusan strategis, prioritas anggaran dan advokasi, serta masukan dalam proses penyusunan anggaran secara rutin. Keterlibatan dalam penyusunan anggaran seharusnya lebih efisien, lebih efisien dan informasi hasil yang lebih akurat. Kemungkinan keterlibatan berbagai pihak dalam proses pengambilan keputusan dalam penyusunan anggaran (Mulyadi, 2001:515).

Partisipasi anggaran adalah salah satu pendekatan mendalam dari bawah ke atas proses penyusunan anggaran, dimana data anggaran mengalir melalui sebuah sistem partisipatif dimulai dari tingkat akuntabilitas yang lebih rendah di tingkat tersebut tanggung jawab yang lebih besar. Setiap orang bertanggung jawab untuk mengendalikan biaya/pendapatan harus menyiapkan perkiraan anggaran dan mendelegasikannya kepada manajemen puncak. Penilaian kemudian tinjau, konsolidasi dalam pergerakannya ke level yang lebih tinggi manajemen puncak (Garrison, 2013:384).

Dalam hal penganggaran menjelaskan bahwa partisipasi atau partisipasi adalah mekanisme langsung yang menyatukan orang-orang dan mempengaruhi perumusan tujuan anggaran di mana pencapaiannya akan terlihat dan dihargai dan kemungkinan besar akan dihargai. tergantung pada pencapaian tujuan anggaran. Keterlibatan ini merupakan hubungan bolak-balik antara karyawan dan atasan, setelah itu karyawan melakukan aktivitas yang diperlukan mulai dari tahap awal persiapan anggaran, negosiasi, penetapan anggaran, dan peningkatan anggaran yang diperlukan (Wijaya, 2018).

Penelitian yang dilakukan oleh (Rolianti 2022) menyatakan bahwa Partisipasi Anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja anggaran berbasis *Value For Money*. Maka dapat di tarik kesimpulan untuk hipotesisnya sebagai berikut :

H4 : Partisipasi anggaran berpengaruh terhadap kinerja anggaran berbasis *Value For Money*.

5. Pengaruh ketepatan waktu terhadap kinerja anggaran berbasis *value for money*

Ketepatan waktu mengacu pada interval waktu antara penyajian informasi yang diinginkan dan frekuensi komunikasi. Jika informasi ditransmisikan untuk waktu yang lama, itu akan kehilangan nilai informasi dengan mempengaruhi kualitas keputusan. Ketepatan waktu merupakan faktor penting dalam menyajikan informasi yang relevan. Karakteristik informasi yang relevan harus memiliki nilai prediktif dan disajikan tepat waktu (Baridwan, 2012:20).

Penelitian yang dilakukan oleh (Satriani 2022) menyatakan bahwa ketepatan waktu berpengaruh positif terhadap kinerja anggaran berbasis *Value For Money*. Maka dapat di tarik kesimpulan untuk hipotesisnya sebagai berikut :

H5 : Ketepatan waktu berpengaruh terhadap kinerja anggaran berbasis *Value For Money*.